

Peranan Interfet dalam Proses Pengembalian Perdamaian dan Keamanan Timor Timur Tahun 1999

Bangun Hutama Winata^{1*}, Syaiful² dan Tontowi³

FKIP Unila Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
e-mail : Bangunhutamawinata@gmail.com, Hp. 085658990820

Received: February 8, 2017 Accepted: March 2, 2017 Online Published: March 6, 2017

Abstract: Interfet Role in The Process of Restitution of Peace and Security in East Timor 1999. *The purpose of this research was to determine the role of INTERFET (International Force For East Timor) in the process of return of peace and security in East Timor in 1999. This research uses historical method with documentation and literature. Based on the research results, the role of INTERFET (International Force For East Timor) in the proses of return of peace and security in East Timor in 1999 are to establish cooperation with the military and security for directly by the functioning of the role of land, sea, and air.*

Keywords: *interfet, security, peace, east timor*

Abstrak: Peranan Interfet dalam Proses Pengembalian Perdamaian dan Keamanan Timor Timur Tahun 1999. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan INTERFET (*International Force For East Timor*) dalam proses pengembalian perdamaian dan keamanan Timor Timur tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode historis dengan dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, peranan INTERFET (*International Force For East Timor*) dalam proses pengembalian perdamaian dan keamanan Timor Timur tahun 1999 adalah menjalin kerja sama dengan TNI dan melakukan pengamanan secara langsung dengan memfungsikan peranan darat, laut, dan udara.

Kata kunci: interfet, keamanan, perdamaian, timor timur

PENDAHULUAN

Penjajahan Portugal di Timor Timur selama 450 tahun. Portugal pertama kali menduduki Timor Timur diperkirakan antara Tahun 1512-1515, setelah Alfonso Dalbuquerque menaklukan Malaka, pelaut Portugal hasil mendekati Parajati Timor tahun 1524. Kedatangan Portugal ke Timor ditanggapi oleh masyarakat Timor itu sendiri dengan melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Domingos Daormac dan Domingos Dacosta tahun 1629, namun berhasil direbut kembali oleh Portugal 1664. Pendudukan wilayah Timor Timur oleh Portugal sempat terusik oleh kedatangan Belanda pada saat itu namun berakhir setelah kedua belah pihak melakukan kesepakatan pembagian kekuasaan dengan dikeluarkannya *Sentece arbitral* pada tahun 1913 (Sri Lestari Rahayu, 1999:19).

Pada tanggal 25 April 1974, terjadi kudeta militer yaitu jatuhnya rezim Presiden Antonio de Oliveira Salazar dan Perdana Menteri Marcel Caetano oleh Antonio Ribeiro de Spinoza yang disebabkan revolusi kebijakan yang membuat terjadinya inflasi besar Negara Portugal. Hal itu membuat Spinoza memberikan tiga pilihan pada negara-negara jajahan Portugal yaitu perang, revolusi, atau melakukan *Self-Determination*.

Pemerintahan Spinoza yang menerapkan kebijakan baru membuat rakyat Timor Timur mendirikan partai-partai baru antara lain ASDT (*Associacio Social Democratica Timor*) yang kemudian menjadi Fretilin (*Frente Revolucionara do Timor Leste Independence*), UUDT (*Uniao Demoeratica Timorensis*) ALTI yang kemudian menjadi Apodeti (*Associacio Populer*

Democratica Timor), KOTA (*Klibur Ouan Timur Aswain*), dan Trabalista.

Perbedaan tujuan antar partai menyebabkan terjadinya kekerasan dan perang saudara, Fretilin yang bergerak kearah komunis lebih memilih untuk merdeka dibandingkan berintegrasi dengan Indonesia seperti Partai Apodeti, UDT, KOTA, Trabalista.

Pada tanggal 28 November 1975, terjadi dua proklamasi yang diawali oleh Fretilin setelah terjadi gerilya yang mendesak Fretilin. Hal tersebut membuat kalangan Fretilin memproklamirkan kemerdekaan Republik Timor Timur di Dili dengan memilih Francisco Xavier Da Amaral. Pada tanggal 30 November 1975 koalisi empat partai yang ingin berintegrasi ikut juga memproklamirkan kemerdekaan atau yang lebih dikenal Deklarasi Balibo.

Konflik tersebut terus berlanjut meskipun sudah diproklamirkan kemerdekaan Timor Timur. Keinginan Fretilin yang menginginkan Timor Timur merdeka membuat konflik menjadi berkepanjangan, namun konflik tersebut berubah menjadi antara Militer Indonesia dan kelompok bersenjata Fretilin sekitar tahun 1975. Indonesia pada saat itu khawatir jika komunis akan berkembang di wilayah Indonesia, karena Indonesia merupakan basis negara anti komunis Asia Tenggara. jika Indonesia tidak segera mengatasi konflik tersebut. Hal itu juga yang mendorong Indonesia melakukan Deklarasi Balibo dan juga melakukan invasi besar besaran.

Jendral TNI Soeharto masih trauma dengan Peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan kekalahan *super power* Amerika Serikat dalam memerangi rezim komunis di

Vietnam Utara pada April 1975. Faktor kecemasan Jakarta akan berkembang pengaruh komunis itulah tampaknya yang mendorong Indonesia merekayasa Deklarasi Balibo, dan juga melakukan invasi besar-besaran dari darat, laut, dan udara atas wilayah Timor Timur 7 Desember 1975 (Syamsuddin Harris, 1999:244).

Invasi besar-besaran yang dilakukan Militer Indonesia saat itu membuat banyaknya korban, terbukti dari banyaknya laporan warga setempat kepada Palang Merah Internasional terhadap kekejaman Militer Indonesia pada saat itu. Hal itu menimbulkan reaksi masyarakat internasional dan mengancam Pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia. Menurut Gubernur Mario Carrascalao “pada 1986, misalnya mensinyalir sekitar 100 ribu orang tewas sejak Invasi Indonesia, sementara Ramos Horta menyebutkan lebih fantastis sekitar 200 ribu orang tewas selama periode 1974-1980” (Syamsuddin Harris, 1999:258).

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Suharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya, kemudian digantikan oleh B. J. Habibie. Pada saat itu Habibie mewarisi keadaan negara yang kacau balau pada masa orde baru yang pada saat itu menimbulkan banyaknya kerusakan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk masalah di Timor Timur.

Masalah Timor Timur ini membuat Habibie mengambil kebijakan melalui rapat kabinet 9 Juni 1998 yaitu pemberian status khusus dengan otonomi luas dengan status bergabung dengan Indonesia atau menjadi negara sendiri. Merupakan penyelesaian yang paling

realistis, paling mungkin terlaksana sekaligus merupakan suatu kompromi yang adil antara integrasi penuh dan aspirasi kemerdekaan. Bahkan hal itu Mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan Resolusi 1246 Dewan Keamanan PBB membentuk UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) untuk mengkoordinasi setiap proses pelaksanaan referendum di Timor Timur. Tugas yang diemban UNAMET adalah mengatur dan mengusahakan pemilihan secara langsung, rahasia dan universal sabagai dasar penentuan pendapat rakyat Timor Timur.

Pada tanggal 4 September 1999 hasil jajak pendapat diumumkan secara bersama-sama di Dili dan New York dengan hasil 78,5 persen atau 450.000 memilih merdeka dan 21 persen atau 94.388 memilih otonomi dan suara 1,8 persen atau 7.985 dinyatakan tidak sah. Dengan kata lain masyarakat Timor Timur memilih merdeka. Akibat dari hasil jajak pendapat tersebut konflik pun tidak terhindarkan banyaknya kekacauan, pembakaran, penjarahan, dan pembunuhan di wilayah Timor Timur oleh kelompok pro integrasi akibat tidak terimanya keputusan tersebut .

Melihat kondisi Indonesia yang pada saat itu masih kacau dan keadaan di Timor Timur semakin mencekam membuat Indonesia menyetujui usulan Dewan keamanan PBB meminta masuknya pasukan multinasional PBB untuk mengembalikan keamanan dan perdamaian di Timor Timur. Pasukan Multinasional PBB atau INTERFET (*International Force East Timor*) merupakan pasukan yang terdiri dari

berbagi Negara. Banyaknya pihak-pihak yang terkait seperti UNAMET, INTERFET, dan UNTEAT dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di Timor Timur. Maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Peranan INTERFET Dalam Proses Pengembalian Perdamaian Dan Keamanan Timor Timur Tahun 1999.

METODE PENELITIAN

Menurut Hadari Nawawi yang dimaksud metode penelitian historis adalah prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali juga hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang (Hadari Nawawi, 2001: 79).

Metode penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian *trend* yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang (Mohammad Nazir, 1988: 56). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian historis adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menganalisis secara kritis peninggalan masa lampau berupa data dan fakta atau dokumen yang disusun secara sistematis, dari evaluasi yang objektif dari data yang berhubungan dengan kejadian masa lampau untuk memahami kejadian

atau keadaan baik masa lalu maupun masa sekarang.

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi inti perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1990: 91). Sumadi Suryambata mengemukakan, bahwa variabel adalah sebagai gejala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian (Sumadi Suryambata, 2006: 126).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka dan dokumentasi. Menurut Muhammad Ali dalam bukunya Penelitian Kependidikan Prosedur dan strategi, beliau berpendapat: setiap peneliti seyogyanya berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi, baik berupa teori-teori, generalisasi, maupun konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang ada pada sumber kepustakaan, (Muhammad Ali, 1987; 43).

Menurut Basrowi dan Suwardi, mengatakan bahwa teknik dokumentasi juga dapat diartikan sebagai suatu metode atau cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi dan Suwardi, 2008; 158).

Menurut Miles dan Huberman, yang dikutip H.B. Sutopo, tentang tahapan-tahapan dalam proses analisis data kualitatif meliputi:

1. Reduksi Data yaitu sebuah proses pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di

lapangan. Reduksi data juga merupakan bentuk analisis yang tajam, menggolongkan, mengarahkan, serta membuang yang tidak perlu serta mengorganisir data sampai akhirnya bisa menarik kesimpulan.

2. Penyajian Data yaitu data yang dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, sehingga dalam penganalisis atau mengambil tindakan nantinya akan berdasarkan pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.
3. Verifikasi data yaitu menarik sebuah kesimpulan secara utuh setelah semua makna-makna yang muncul dari data sudah diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang jelas kegunaanya dan kebenarannya (H.B. Sutopo, 2006: 113).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika dilihat dari periodisasinya menurut Haris Samsudin, secara umum konflik Timor Timur dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Masuknya Portugal sampai tahun 1974
Periode konflik antara orang Timor Timur dengan penguasa Kolonial Portugal. Perlawanan dengan skala kecil beberapa kali terjadi, namun penguasa Portugal berhasil

mengendalikannya. Pada masa yang panjang itu terjadi *represi* secara sistematis atas orang-orang Timor Timur sebagai penduduk wilayah jajahan.

2. Periode 1974-1975
Periode ini merupakan periode perang saudara. Kekerasan terjadi antara orang Timor Timur sendiri pada saat itu berkembang menjadi perang saudara yang menelan banyak korban serta menyebabkan mengalirnya para pengungsi ke wilayah Timor Barat. Keadaan ini turut memberikan justifikasi bagi Indonesia melakukan intervensi militer untuk meleraikan perang saudara tersebut namun dengan membantu kelompok prointegrasi.
3. Periode 1975-1978
Periode ini merupakan konflik antara militer Indonesia dengan kelompok bersenjata Fretilin (Falintil), yang dikatakan oleh suatu sumber bahwa saat itu secara teknis bisa menguasai sebagian besar wilayah Timor Timur. Perang saudara masih berlanjut, namun di dimensinya berubah sebab Tentara Indonesia berada dibelakang kelompok prointegrasi, yang secara membawa konflik tersebut menjadi Indonesia melawan kekuatan perlawanan Fretilin yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri melalui perang di hutan.
4. Periode 1978-1998
Pada periode ini disebut sebagai periode kerjasama dan resistansi. Periode ini merupakan kekerasan politik antara orang-orang Timor Timur antara pihak militer dan

sipil terutama disebabkan oleh faktor kerjasama ataupun resistensi dengan pihak keamanan.

5. Masa pasca-Soeharto (sejak 21 Mei 1998)

Periode ini mula-mula ditandai dengan ketidak pastian politik, sebagai akibat *euphobia* politik di Indonesia. *Skirmisis* terjadi dalam bentuk bentrok kecil-kecil antara kelompok prointegrasi dengan kelompok prokemerdekaan, juga konflik pahak militer. Namun peta konflik ini kembali memuncak setelah Habibie memberikan opsi untuk menentukan masa depan Timor Timur apakah akan tetap berintegrasi (otonomi luas) dengan Indonesia atau akan melepaskan diri menjadi Negara merdeka. Sebagai akibat tersebut terjadi pergesekan dikursus politik di Timor Timur (Syamsuddin Haris, 1999:248-249).

Berakhirnya pemerintahan Presiden Suharto pada saat itu memberikan harapan baru untuk Indonesia terutama kasus Timor Timur yang merupakan bekas jajahan Belanda sekitar 23 tahun yang di klaim Indonesia sebagai Provinsi ke 27 Republik Indoensia.

Peluang bagi penyelesaian yang lebih adil, demokratis, lebih terbuka ketika pemerintahan Presiden Habibie melalui Menteri Luar Negeri Ali Alatas menawarkan dua pilihan (opsi). Pada periode ini pemerintah mengumumkan kebijakan dimulai ketika 9 Juni 1998, pemerintah mengumumkan kebijakan pemberian opsi atau pilihan kepada masyarakat Timor Timur itu sendiri, yaitu pemberian opsi I mengenai tawaran otonomi

khusus yang diperluas, kemudian Pemerintah Habibie memberikan kebijakan opsi II pada tanggal 27 Januari 1999.

Kebijakan Opsi I tentang otonomi khusus yang diperluas untuk Timor Timur pertama kali dikeluarkan oleh Pemerintah Habibie tanggal 9 Juni 1998. Tawaran itu sendiri konon disusun oleh sekelompok intelektual Timor Timur yang pro integrasi tapi tidak setuju praktek-praktek militer yang brutal di wilayah tersebut, namun terlepas dari asal-usulnya ini merupakan perkembangan yang cukup maju dibandingkan dengan ketiadaan kebijakan yang jelas selama pemerintahan Suharto.

Usulan mengenai Otonomi luas dibahas dalam *Dialog Senior Official Meeting* (SOM) pada tanggal 4-5 Agustus 1998 yang merupakan kelanjutan dari pertemuan 27 Juni 1996, mengelaborasi usulan Opsi I, yaitu konsep otonomi luas dengan status Khusus yang ditawarkan Pihak Indonesia (Sri Lestari Rahayu, 1999:26). Konsep otonomi yang diperluas untuk Timor Timur kemudian dibahas dalam dialog segitiga tingkat pejabat tinggi di New York pada 26 Oktober 1998.

Penyebab mendorong dikeluarkannya opsi II Penyebab pertamanya adalah perbedaan konsep antara Indonesia, Portugal dan kelompok Resistensi tentang tujuan akhir dari status otonomi luas sebagai solusi final bagi Timor Timur, sedangkan Portugal dan kelompok-kelompok anti integrasi memandang penerapan otonomi luas sebagai suatu periode transisional menuju referendum. Selain itu juga penyebab kedua dikeluarkannya opsi II oleh Habibie adalah desakan dari Perdana Menteri John Howard pada

waktu itu, melalui *faxsimile* sebanyak dua kali.

Perundingan persetujuan New York 5 Mei 1999 oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Menteri Luar Negeri Jaime Gama dengan disaksikan Sekjen PBB merupakan klimaks perundingan lebih dari 15 tahun yang disponsori PBB dan mempunyai bobot historis karena akan menentukan masa depan Timor Timur. Pilihan yang ditawarkan kepada Rakyat Timor Timur adalah apakah mau menerima otonomi dengan status khusus atau menolak yang mengakibatkan lepas dari Indonesia.

Setelah mensepakati dari hasil persetujuan antara Indonesia, Portugal, dan PBB, maka PBB membentuk lembaga UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) yang bertujuan untuk mengorganisasi dan mengawasi persiapan pelaksanaan jajak pendapat di Timor Timur. "Misi PBB untuk Timor Timur (UNAMET) merupakan lembaga PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi 1246 Dewan Keamanan PBB yang dibentuk berdasarkan resolusi 1246 Dewan Keamanan PBB untuk mengorganisasi dan mengawasi proses persiapan dan pelaksanaan referendum di Timor Timur" (Kiki Syahnakri, 2013:222).

Pendaftaran dilaksanakan pada Tanggal 16 Juli 1999 hingga 4 Agustus 1999 dan kemudian UNAMET meminta perpanjangan hingga 6 September 1999. Mengutip dari penjelasan Luis Bittencourt, Ketua UNAMET setempat, banyak Warga Ambeno yang belum terdaftar, karena wilayah itu harus menampung pendatang sekitar 6000 hingga 7000 orang dari Timor barat yang tersebar di Desa Baokanana,

Bobometo, dan Oekusi. Sementara Ambeno sendiri mempunyai 30.776 warga yang mempunyai hak pilih (CM Rien Kuntari, 2008:119).

Jumlah total warga yang berhak memilih mencapai 451.792 sebanyak 438.513 diantaranya memilih di Timor Timur. Di luar Timor timur, Jumlah pemilih mencapai 13.279 orang (CM Rien Kuntari, 2008:120).

INTERFET (*International Force For East Timor*) merupakan pasukan multinasional perdamaian PBB yang merupakan salah satu dari beberapa cara Dewan Keamanan PBB dalam mengembalikan keamanan dan perdamaian Internasional khususnya di Timor Timur.

Tujuan dari kehadiran pasukan INTERFET ke Timor Timur diatur sesuai dengan mandat Dewan Keamanan PBB pada Piagam PBB Bab VII Resolusi 1264 yaitu pembentukan pasukan multinasional di bawah struktur komando terpadu bertujuan untuk:

- Memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur
- Melindungi dan mendukung UNAMET dalam menjalankan tugasnya
- Untuk memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan (David Dickens, 2001:218).

Pasukan INTERFET dipimpin oleh Mayjen Peter Cosgrove dari Australia dan wakilnya Mayjen Songkitti Jaggabatra dari Thailand.

Berikut adalah negara-negara anggota INTERFET yang ikut dalam misi di Timor Timur:

Tabel 1.1 negara-negara yang berpartisipasi dalam anggota pasukan INTERFET

NO.	Negara	Keterangan
1.	Australia	4500 pasukan 6 fregat 3 destroyer
2.	Korea Selatan	400 tentara
3.	China	Polisi sipil
4.	Thailand	1000 pasukan
5.	Inggris	270 pasukan Dana 5 juta dolar AS Destroyer 3 pesawat terbang
6.	Selandia Baru	800 pasukan 1 tanker, 1 fregat 2 pesawat C-130 4 helikopter
7.	Amerika Serikat	200 pasukan Pesawat C-170, C-5 Pesawat C-130 Logistik dari Armada Pasifik, komunikasi Inteljen
8.	Finlandia	Dana 1 juta dolar AS
9.	Kanada	600 pasukan 2 hercules 1 kapal pendukung
10.	Argentina	50 pasukan
11.	Jepang	Dana 2 juta dolar untuk kemanusiaan dan pengangkutan pasukan
12.	Italia	600 pasukan 1 kapal perang 1 kapal medis

13.	Brazil	30-50 pasukan
14.	Malaysia	1500 pasukan
15.	Prancis	500 pasukan 1 fregat 1 kapal transport
16.	Norwegia	12 ahli medis
17.	Singapura	5 personel 250 pasukan kapal untuk mendarat pasukan
18.	Bangladesh	Sejumlah pasukan
19.	Fhlipina	1440 pasukan non-tempur

Sumber: *Timor Timur Satu Menit Terakhir*.

4 September 1999, pukul 09.00 WITA, hasil jajak pendapat diumumkan secara bersama-sama di Dili dan di New York. Pro kemerdekaan dinyatakan menang telak, dengan mendapatkan 78,5 persen pemilih, sedangkan otonomi 21 persen. Dengan kata lain, dari pemilih 344.580 memilih pro kemerdekaan, 94.388 menerima tawaran otonomi, dan 7.985 suara (1,8 persen) dinyatakan tidak sah (CK Rien Kuntari, 2008:170-171).

Pasca pengumuman hasil referendum yang dimenangi oleh kelompok pro kemerdekaan terjadi kerusuhan hampir seluruh Timor Timur terjadi pembakaran, penjarahan, pembunuhan terjadi di seluruh wilayah Timor Timur. Hal itu terjadi akibat tidak puas dengan hasil jajak pendapat, karena Sebagian kelompok pro integrasi menganggap terjadi kecurangan. Bentrokan demi bentrokan terjadi, salah satunya bentrokan kedua kelompok yang terjadi di Keuskupan di Dili. Setidaknya 25 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dalam

bentrokan tersebut. Menurut pemantauan Kantor berita *Antara* dari Rumah Sakit Umum Dili, mereka terluka akibat bacokan benda tajam dan tembakan. Puluhan luka-luka masih dalam perawatan intensif (CM Rien Kuntari, 2008:179).

Melihat kondisi Indonesia yang pada saat itu masih kacau dan keadaan di Timor Timur semakin mencekram membuat Indonesia menyetujui usulan Dewan Keamanan PBB meminta masuknya pasukan multinasional PBB untuk mengembalikan keamanan dan perdamaian di Timor Timur. Pasukan Multinasional PBB atau INTERFET (*International Force East Timor*) merupakan pasukan yang terdiri dari berbagai negara.

Membentuk Satgas ITFET (*Indonesia Task Force East Timor*). Meskipun serah terima tanggung jawab sudah di berikan kepada INTERFET kerjasama masih dilanjutkan, kerjasama dilakukan dengan membentuk satgas. Satgas dibentuk untuk membantu pasukan INTERFET selama beberapa bulan dalam menjalankan misinya. Satgas yang terdiri dari personel TNI-Polri yang dipimpin oleh Brigjen Pol James Sitorus dengan wakilnya CZI Suryo Prabowo dan dibantu oleh Batalyon 700/Linud yang berfungsi sebagai penghubung antara pihak Indonesia dengan pihak PBB.

Pengamanan wilayah darat oleh pasukan INTERFET adalah untuk melindungi wilayah-wilayah yang berada di Timor Timur dari ancaman kembali oleh milisi. Pengamanan dilakukan dengan melakukan patroli rutin di setiap wilayah yang berada di Timor Timur. Peranan Angkatan Darat INTERFET sangat berperan penting dalam pengembalian keamanan di Timor Timur, dalam

menjankan perannya hampir selama penugasannya pasukan tersebut sering melakukan patrol rutin di setiap wilayah di Timor Timur dengan menggunakan kendaraan lapis bajanya. Selain itu INTERFET juga membagi para tentaranya ke beberapa wilayah yang ada di Timor Timur untuk mencegah milisi melakukan tindakan kekerasan.

Diawali dengan pengamanan wilayah Dili. Pada hari kedua pengamanan pasukan INTERFET yang terdiri dari kelompok 2RAR (*The 2nd Battalion, Royal Australian Regiment*) menangkap 6 anggota milisi yang akan menuju Bandara Komoro. Dari hasil penangkapan didapati beberapa pisau dan tombak.

Pengamanan Wilayah Suai, dalam patrol rutin INTERFET di Suai Pasukan INTERFET menangkap sekelompok milisi. Sebelumnya sempat terjadi kontak senjata antara keduanya yang mengakibatkan dua milisi tewas di tempat dan dua lainnya lolos. Dalam peristiwa ini beberapa dari Tentara Australia terkena luka tembak. Selain itu juga di Suai Pasukan INTERFET yang terdiri dari Australia, Inggris, dan Selandia Baru melakukan pengejaran terhadap milisi. Milisi yang membawa truk kabur yang kemudian pasukan INTERFET menembak bagian ban truk yang mengakibatkan dua milisi terluka, kemudian keduanya dilarikan ke Dili.

Pengamanan Wilayah Montain, dalam pengamanan wilayah ini sebaliknya terjadi gesekan antara Tentara Indonesia dengan pasukan patroli INTERFET. Gesekan terjadi ketika pasukan INTERFET melakukan patrol dekat perbatasan dengan Indonesia. Pada saat itu pasukan patroli INTERFET

dianggap masuk ke dalam wilayah Indonesia dan tentara Indonesia yang berjaga di perbatasan tersebut melakukan tembakan peringatan. Namun tembakan peringatan, dianggap oleh INTERFET sebagai bentuk penyerangan, sehingga kontak senjata pun tidak terhindarkan yang mengakibatkan satu dari anggota Brimob Bharada Ari Sudibyo gugur dan dua personel lainnya terkena luka tembak.

Pengamanan Wilayah *Oecussi Enclave*, *Oecussi Enclave* merupakan wilayah yang masih bagian dari Timor Timur itu sendiri. Pengamanan ini terdiri dari Pasukan Australia dan Pasukan Gurka Inggris, dari hasil pengamanan tertangkap 30-40 milisi yang membawa parang, pipa, bahkan pedang yang kemudian dilucuti senjatanya.

Pengamanan wilayah laut oleh pasukan INTERFET bertujuan untuk mendukung pasukan darat dalam mencapai tujuan mereka, dengan memasukkan pasukan tempur maksimal dalam waktu minimum atau relatif singkat, dan yang terakhir, perencanaan maritim awal difokuskan pada pengawasan daerah, melindungi jalur laut Timor Timur, dan penyediaan transportasi yang tepat untuk membawa pasukan dan alat berat. Pasukan pengamanan wilayah laut di Timor Timur terdiri dari berbagai negara yang tergabung dalam INTERFET dengan mengirimkan kapal-kapalnya dari tiap-tiap negara yang tergabung. Kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal perusak, Fregat, Cruiser, kargo dan Transportasi, dari banyaknya kapal yang ikut dalam perlindungan jalur laut Timor Timur, Australia merupakan negara yang mengirimkan banyak kapal sekitar 17 armada kapal.

Menurut *Naval Component Command* Tujuan penstabilan adalah untuk mendukung pasukan darat dalam mencapai tujuan mereka, dengan memasukkan pasukan tempur maksimal dalam waktu minimum atau relative singkat. dan yang terakhir, perencanaan maritim awal difokuskan pada pengawasan daerah, melindungi jalur laut dari komunikasi untuk Timor Timur, dan penyediaan transportasi yang tepat untuk membawa pasukan dan alat berat. (David Steven, 2007:13).

Kehadiran armada kapal tempur dalam koalisi pasukan INTERFET mungkin dikarenakan pada saat itu terlihat atau terdeteksi kapal selam milik Indonesia memasuki wilayah laut Timor Timur yang dianggap sebagai ancaman dalam proses pengembalian keamanan. Selain itu, dalam pengamanan wilayah laut pasukan INTERFET melakukan pembagian tugas pengamanan periode alokasi waktu yang sudah ditentukan. Diawali bulan September 1999 dan diakhiri bulan Februari 2000.

Pengamanan wilayah udara oleh pasukan angkatan udara INTERFET merupakan kekuatan tambahan. Peranan angkatan udara biasanya akan digunakan jika terjadi sebuah ancaman baik dari laut maupun dari udara dikarenakan keamanan wilayah Timor Timur menjadi tanggung jawab INTERFET. Menurut David Dickens kehadiran kekuatan udara untuk memberikan sebagai kekuatan tempur tambahan dan bila diperlukan (David Dickens, 2001:225).

Peran penuh pasukan tempur RAAF tetap rahasia. RAAF digunakan untuk mengirim pesan yang kuat kepada Indonesia bahwa Australia memiliki kemampuan

tempur udara seperti kualitas bahwa setiap pesawat Indonesia atau serangan maritim di INTERFET akan membawa biaya yang berat. RAAF F18s, F111s dan PC9s (dalam peran pengendali udara ke depan) berada di siaga, tersedia di kesiapan dan diterbitkan dengan perintah *tasking* sehari-hari. RNZAF *Skyhawks* transit melalui daerah yang segera tersedia untuk mendukung RAAF. *Skyhawks* lainnya, dipertahankan pada tinggi negara kesiapan, bisa digunakan untuk melengkapi *strike* maritim RAAF dan dekat kemampuan dukungan udara memiliki intensitas konflik di Timor Timur meningkat takik. RAAF Orions terbang patroli anti-kapal selam. angkatan udara lainnya diposisikan pesawat. Rincian ini tetap diklasifikasikan (*Centre for Strategic Studies*, 2000:2).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa peranan INTERFET dalam proses pengembalian perdamaian Timor Timur tahun 1999 adalah cukup besar, hal ini terlihat dari beberapa usahanya di bawah ini:

INTERFET menjalin kerjasama dengan TNI untuk saling melindungi dan membantu perdamaian dan keamanan.

INTERFET memfungsikan pasukan darat untuk melindungi wilayah darat di Timor Timur dari ancaman milisi.

INTERFET memfungsikan pasukan laut untuk membantu pasukan darat dalam menjalankan misinya dan sekaligus melindungi wilayah laut dari ancaman.

INTERFET memfungsikan pasukan udara sebagai kekuatan keamanan tambahan dalam melindungi wilayah di Timor Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad. 1987. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arikunto, Suharmi. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dickens, David. 2001. *The Nations in East Timor: Intervention at the Military Operation Level*. Contemporary Southeast Asia. Volume 23.
- Kuntari, CM Rien. 2008. *Timor Timur Satu Menit Terakhir Catatan Seorang Wartawan*. Bandung: Mizan.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Nazir, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian Masyarakat dan Strategi*. Angkasa. Bandung.
- Rahayu, Sri Lestari. 1999. *PENYELESAIAN SENGKETA KASUS WILAYAH TIMOR TIMUR (Telaah dari Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional)*. volume 48.
- Syamsuddin Haris. 1999. *Indonesia di Ambang Perpecahan*. Jakarta. Erlangga.
- Strategic Briefing Paper, CCS. 2000 *Strategic And Military Lessons From East Timor*. New Zealand. Victoria University of Wellington. Volume 2

- Stevens, David. 2007. *Strength through diversity: The combined naval role In operation stabilise.* the Sea Power Centre – Australia. Number 20.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Psikologi Pendidikan.* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Surakarta. UNS.